Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 248-263
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3540
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Transformasi Nilai-Nilai Islam terhadap Pemahaman Politik Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

Rizki Amanda Harahap[1]*, Aprilinda. M Harahap[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : rizki0404221004@uinsu.ac.id [1], aprilindamartinondang@uinsu.ac.id [2]*
**Penulis Korespondensi: rizki0404221004@uinsu.ac.id [1]*

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the transformation of Islamic values and its implications for students' political understanding at the Faculty of Ushuluddin and Islamic Studies, State Islamic University of North Sumatra. This study employs a qualitative approach through field research. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving students selected using purposive sampling. Data analysis consisted of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the transformation of Islamic values occurs through lectures, Islamic studies, student organizations, interactions with lecturers, peer environments, and social media. These processes shape students' understanding of justice, trustworthiness, consultation (shura), brotherhood (ukhuwah), tolerance, and responsibility in political life. Interviews with 10 informants revealed three categories of political understanding: students who understand politics but have not yet applied it, students who understand and participate in political activities, and students whose political understanding remains inadequate. Political participation is demonstrated through exercising voting rights, following political developments, engaging in discussions, expressing opinions, participating in deliberations, and critically evaluating political information. The study concludes that the transformation of Islamic values contributes to the development of students' political understanding, although its application varies. It encourages a moderate, critical, responsible, and justice-oriented political perspective that emphasizes the public good.*

Keywords: *Islamic Education; Islamic Politics; Political Understanding; Students; Transformation of Islamic Values.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi nilai-nilai Islam serta implikasinya terhadap pemahaman politik mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai Islam berlangsung melalui perkuliahan, kajian keislaman, organisasi kemahasiswaan, interaksi dengan dosen, lingkungan pertemanan, dan media sosial. Proses tersebut membentuk pemahaman mahasiswa terhadap nilai keadilan, amanah, musyawarah, ukhuwah, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Berdasarkan wawancara terhadap 10 informan, ditemukan tiga kategori pemahaman politik mahasiswa, yaitu mahasiswa yang memahami politik tetapi belum menerapkannya, mahasiswa yang memahami dan melaksanakan politik, serta mahasiswa yang belum memahami politik secara memadai. Penerapan pemahaman politik terlihat melalui penggunaan hak pilih, mengikuti perkembangan politik, berdiskusi, menyampaikan pendapat, bermusyawarah, dan bersikap kritis terhadap informasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi nilai-nilai Islam berkontribusi terhadap pembentukan pemahaman politik mahasiswa, meskipun tingkat penerapannya berbeda-beda. Transformasi tersebut mendorong pemahaman politik yang moderat, kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Mahasiswa; Pemahaman Politik; Pendidikan Islam; Politik Islam; Transformasi Nilai-Nilai Islam.

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara berada dalam lingkungan akademik yang mempertemukan kajian keislaman dengan berbagai persoalan sosial, kebangsaan, dan politik. Kondisi tersebut menjadikan mahasiswa tidak hanya dituntut memahami ajaran Islam secara normatif, tetapi juga mampu menghubungkannya

Naskah Masuk: 11 Februari 2026; Revisi: 19 Februari 2026; Diterima: 25 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

dengan realitas kehidupan masyarakat. Pemahaman politik mahasiswa dapat terbentuk melalui proses pembelajaran, diskusi akademik, organisasi kemahasiswaan, interaksi sosial, serta pengalaman mengikuti perkembangan politik. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, persaudaraan, dan kemaslahatan dapat menjadi bagian dari kerangka berpikir mahasiswa ketika memahami politik. Penelitian mengenai mahasiswa juga menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam dapat mengalami perubahan melalui proses pembelajaran, pengalaman sosial, serta perkembangan dinamika politik kontemporer (Saragih & Zulkarnaen, 2025).

Pemahaman politik mahasiswa tidak selalu berada dalam kondisi yang sama karena setiap individu memiliki pengalaman, pengetahuan, lingkungan sosial, dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Sebagian mahasiswa dapat memahami politik sebagai proses pengelolaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan mahasiswa lainnya mungkin lebih melihat politik melalui persoalan jabatan, kepemimpinan, pemilu, atau aktivitas organisasi. Perbedaan tersebut menjadi penting karena pemahaman politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui istilah dan konsep politik, tetapi juga kemampuan memberikan makna terhadap kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi masyarakat. Kajian mengenai mahasiswa perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa aspirasi politik mahasiswa dapat berkaitan dengan persoalan negara, hukum Islam, sistem politik, identitas keagamaan, dan cara menyampaikan aspirasi secara konstitusional (Zada et al., 2022).

Transformasi nilai-nilai Islam menjadi bagian penting dalam pembentukan cara berpikir mahasiswa karena nilai keislaman tidak hanya diperoleh melalui teori, tetapi juga melalui proses penghayatan dan pengalaman dalam kehidupan akademik. Perkuliahan, kajian keislaman, kegiatan organisasi, hubungan dengan dosen, lingkungan pertemanan, serta berbagai sumber informasi dapat menjadi ruang terjadinya proses tersebut. Nilai yang awalnya dipahami sebagai konsep keagamaan dapat berkembang menjadi prinsip yang digunakan mahasiswa ketika menilai persoalan sosial dan politik. Penelitian mengenai transinternalisasi nilai-nilai Islami di perguruan tinggi menunjukkan pentingnya proses pendidikan dalam membentuk pemahaman dan sikap mahasiswa. Demikian pula, pembelajaran agama yang memasukkan nilai moderasi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang lebih terbuka dan proporsional dalam kehidupan mahasiswa (Hanum et al., 2021; Muhja et al., 2022).

Dalam kehidupan politik, nilai-nilai Islam memiliki relevansi dengan cara mahasiswa memahami hubungan antara kekuasaan dan kepentingan masyarakat. Keadilan dapat menjadi dasar dalam menilai kepemimpinan, amanah berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan musyawarah dapat menjadi prinsip dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, ukhuwah, toleransi, dan kemaslahatan dapat membantu mahasiswa memahami bahwa perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu disikapi secara bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak otomatis menghasilkan pemahaman politik yang seragam karena penerapannya dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan masing-masing mahasiswa. Oleh sebab itu, transformasi nilai Islam perlu dilihat sebagai proses yang berlangsung secara bertahap melalui pembelajaran, interaksi, refleksi, dan pengalaman mahasiswa dalam menghadapi persoalan kehidupan sosial (Shihab, 2022; Nata, 2021).

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan karena mahasiswa memperoleh informasi politik dari lingkungan yang semakin beragam. Selain melalui ruang perkuliahan dan organisasi kampus, mahasiswa dapat mengikuti perkembangan politik melalui media sosial, pemberitaan digital, video kajian, diskusi daring, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Kondisi ini memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi serta pandangan politik dalam jumlah besar, tetapi sekaligus menuntut kemampuan untuk memahami, membandingkan, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Penelitian mengenai transformasi pemikiran politik Islam mahasiswa FUSI UINSU menunjukkan bahwa dinamika politik nasional dan global, akses terhadap literatur, serta media sosial turut menjadi bagian dari perkembangan pemikiran politik mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemahaman politik berlangsung melalui interaksi antara pendidikan akademik, lingkungan sosial, perkembangan informasi, dan pengalaman mahasiswa (Saragih & Zulkarnaen, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai transformasi nilai-nilai Islam terhadap pemahaman politik mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara penting dilakukan untuk memahami hubungan antara nilai keislaman yang dipelajari dengan cara mahasiswa memaknai persoalan politik. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah mahasiswa mengetahui nilai-nilai Islam, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dipahami, diinternalisasi, dan digunakan ketika mahasiswa menilai kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, serta kemaslahatan masyarakat. Kajian sebelumnya telah membahas pendidikan nilai Islam, moderasi beragama, dan transformasi pemikiran politik mahasiswa, tetapi penelitian ini memberikan perhatian pada proses transformasi nilai Islam dalam membentuk pemahaman politik mahasiswa pada lingkungan FUSI UIN Sumatera Utara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai proses pembentukan pemahaman politik mahasiswa melalui perspektif nilai-nilai Islam (Riduan & Lutfi, 2023; Saragih & Zulkarnaen, 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

Transformasi Nilai-Nilai Islam

Transformasi nilai-nilai Islam merupakan proses perubahan dan perkembangan pemahaman seseorang terhadap nilai keislaman sehingga nilai tersebut tidak berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi dapat menjadi dasar dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, transformasi nilai berlangsung melalui proses pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, interaksi sosial, serta pengalaman yang memungkinkan seseorang memahami dan menghayati nilai yang diterima. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, ukhuwah, toleransi, dan kemaslahatan dapat ditanamkan melalui lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Mahasiswa sebagai kelompok akademik mengalami proses transformasi melalui perkuliahan, organisasi, kajian keislaman, interaksi dengan dosen, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, transformasi nilai Islam dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai keagamaan menjadi prinsip berpikir dan bertindak dalam menghadapi persoalan kehidupan (Hanum et al., 2021; Huda, 2021).

Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Politik

Nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik merupakan prinsip moral dan etika yang dapat menjadi pedoman dalam memahami kekuasaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Islam memberikan perhatian terhadap nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*asy-syura*), persamaan, tanggung jawab, persaudaraan, dan kemaslahatan. Politik dalam perspektif tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas memperoleh kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Nilai amanah menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan musyawarah memberikan ruang bagi keterlibatan dan pertukaran pendapat. Nilai keadilan menjadi prinsip penting agar keputusan politik tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok semata. Oleh karena itu, nilai Islam dapat menjadi kerangka etis bagi mahasiswa dalam memahami dinamika politik (Shihab, 2022; Lavan, 2021).

Pemahaman Politik Mahasiswa

Pemahaman politik mahasiswa merupakan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui, memahami, menilai, dan memberikan makna terhadap berbagai persoalan politik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, kebijakan publik, partisipasi politik, serta hubungan antara agama dan politik. Pemahaman politik tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan menjelaskan konsep politik, tetapi juga melalui kemampuan mahasiswa mengikuti perkembangan politik, berdiskusi, menyampaikan pendapat, menggunakan hak pilih, memahami proses pengambilan keputusan, dan menyikapi informasi politik secara kritis. Pada mahasiswa yang mempelajari pemikiran politik Islam, pemahaman tersebut juga dapat berkembang melalui kajian hubungan antara prinsip-prinsip Islam dengan realitas politik kontemporer. Dengan demikian, pemahaman politik mahasiswa terbentuk melalui perpaduan antara pendidikan akademik, pengalaman sosial, informasi, dan lingkungan kehidupan mahasiswa (Zada et al., 2022; Saragih & Zulkarnaen, 2025).

Transformasi Nilai-Nilai Islam terhadap Pemahaman Politik Mahasiswa

Transformasi nilai-nilai Islam terhadap pemahaman politik mahasiswa dapat dipahami sebagai proses ketika nilai keislaman yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman sosial berkembang menjadi kerangka berpikir dalam memahami persoalan politik. Nilai keadilan dapat membantu mahasiswa menilai tindakan dan kebijakan berdasarkan prinsip kesetaraan, nilai amanah dapat membentuk pemahaman mengenai tanggung jawab pemimpin, sedangkan musyawarah dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya dialog dan pertukaran pendapat dalam pengambilan keputusan. Nilai ukhuwah dan toleransi juga dapat membantu mahasiswa menghadapi perbedaan pilihan dan pandangan politik secara lebih konstruktif. Proses tersebut tidak selalu menghasilkan bentuk pemahaman yang sama karena setiap mahasiswa memiliki pengalaman pendidikan, lingkungan sosial, organisasi, dan sumber informasi yang berbeda. Oleh karena itu, transformasi nilai Islam menjadi proses yang dapat membentuk cara mahasiswa memaknai politik secara kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Riduan & Lutfi, 2023; Muhja et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memahami secara mendalam proses transformasi nilai-nilai Islam terhadap pemahaman politik mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam karena lingkungan tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian keislaman, pemikiran politik Islam, serta pembentukan pemahaman mahasiswa mengenai persoalan sosial dan politik. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan utama terdiri atas mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara yang memiliki pengalaman dalam kegiatan akademik, kajian keislaman, organisasi, atau aktivitas yang berkaitan dengan persoalan politik. Informan pendukung dapat melibatkan dosen atau pihak fakultas apabila diperlukan untuk memperkuat informasi penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mahasiswa dalam memperoleh nilai-nilai Islam serta cara mereka memahami dan memaknai persoalan politik, khususnya nilai keadilan, amanah, musyawarah, ukhuwah, toleransi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan aktivitas mahasiswa dan lingkungan akademik yang berkaitan dengan proses pembentukan serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen akademik, kegiatan mahasiswa, dokumentasi organisasi, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai proses transformasi nilai-nilai Islam terhadap pemahaman politik mahasiswa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara terhadap mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, ditemukan bahwa pemahaman politik mahasiswa berada pada tingkat yang beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari cara mahasiswa memperoleh informasi, memahami persoalan politik, menyikapi informasi, serta menerapkan pengetahuan politik dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan politik diperoleh melalui dosen, organisasi mahasiswa, pertemanan, kajian, dan media sosial. Keberagaman sumber tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemahaman politik mahasiswa tidak hanya berlangsung melalui proses pembelajaran formal, tetapi juga melalui lingkungan sosial dan perkembangan teknologi informasi (Alfaruqy & Sari, 2025).

Media sosial menjadi salah satu sumber yang cukup penting karena memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengetahui perkembangan politik dan kebijakan pemerintah. Namun, banyaknya informasi yang tersedia tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki pemahaman politik yang baik. Informasi yang diterima tetap membutuhkan kemampuan untuk memilah, memeriksa kebenaran, dan memahami konteksnya. Dengan demikian, pemahaman politik tidak hanya berkaitan dengan banyaknya informasi yang diketahui, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam mengolah informasi tersebut menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan sikap (Alfaruqy & Sari, 2025).

Sebagian mahasiswa telah mengetahui dan memahami persoalan politik, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan. Mahasiswa pada kondisi ini telah mengetahui pentingnya politik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengetahui berbagai persoalan politik yang berkembang, tetapi belum aktif menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara aspek mengetahui dan aspek melakukan. Pendidikan politik sendiri tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara (Prayogo & Wardhani, 2022).

Kondisi mahasiswa yang mengetahui tetapi belum mengamalkan pengetahuannya dapat dikaitkan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai hubungan ilmu dan amal. Al-Ghazali menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang harus memberikan pengaruh terhadap perbuatan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan tindakan, sehingga ilmu tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Dengan demikian, mahasiswa yang telah memahami politik tetapi belum menerapkannya dapat dikategorikan sebagai kondisi ketika aspek ilmu telah dimiliki, sedangkan pengamalannya belum terlaksana secara optimal (Anggalina et al., 2024; Sauqi, 2026).

Pada sisi lain, terdapat mahasiswa yang telah mampu menerapkan pemahaman politik dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk penerapannya terlihat melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu dengan mempertimbangkan informasi mengenai calon atau isu yang berkembang, mengikuti berita politik dan kebijakan pemerintah, berdiskusi mengenai persoalan politik, serta menyampaikan pendapat terhadap kebijakan yang dianggap penting. Mahasiswa juga menunjukkan perhatian terhadap dampak kebijakan pemerintah terhadap persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa pemahaman politik telah berkembang dari sekadar pengetahuan menjadi tindakan (Prayogo & Wardhani, 2022).

Penerapan pemahaman politik juga terlihat dari kemampuan mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Mahasiswa tidak seharusnya langsung mempercayai atau menyebarkan informasi politik yang belum jelas kebenarannya. Sikap memeriksa informasi dan mempertimbangkan sumber sebelum menentukan sikap merupakan bagian penting dari literasi politik di tengah perkembangan media digital. Kemampuan tersebut dapat membantu mahasiswa membentuk pandangan politik berdasarkan pertimbangan yang rasional, bukan hanya mengikuti informasi atau pendapat yang sedang berkembang (Alfaruqy & Sari, 2025).

Dalam praktiknya, mahasiswa juga perlu memahami bahwa berpolitik bukan berarti bebas melakukan tindakan apa pun. Keterlibatan politik seharusnya dilakukan secara kritis, rasional, bertanggung jawab, dan tetap menghargai perbedaan. Ketika mahasiswa tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, misalnya, aspirasi dapat disampaikan melalui diskusi, kajian, tulisan, musyawarah, forum organisasi, penyampaian kritik kepada pihak terkait, maupun demonstrasi secara damai. Penyampaian pendapat tidak seharusnya dilakukan melalui kekerasan, perusakan fasilitas umum, provokasi, atau tindakan anarkis yang merugikan masyarakat. Partisipasi politik yang bertanggung jawab membutuhkan keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan penghormatan terhadap hak orang lain (Prayogo & Wardhani, 2022).

Cara berpolitik tersebut dapat dikaitkan kembali dengan pemikiran AlGhazali mengenai ilmu dan amal. Apabila mahasiswa telah memiliki pengetahuan politik, maka pengetahuan tersebut seharusnya mengarahkan mereka kepada tindakan yang baik dan bertanggung jawab. Artinya, mahasiswa yang memahami politik tidak hanya dituntut berani menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu mengendalikan cara menyampaikan kritik tersebut. Pengetahuan politik yang diwujudkan dalam dialog, musyawarah, argumentasi, dan penyampaian aspirasi secara damai menunjukkan bahwa ilmu telah memberikan arah terhadap tindakan. Pandangan Al-Ghazali mengenai ilmu yang berorientasi pada amal juga menekankan bahwa pengetahuan idealnya memiliki dampak terhadap pembentukan sikap dan tanggung jawab sosial (Anggalina et al., 2024).

Sementara itu, masih terdapat mahasiswa yang belum memiliki pemahaman politik secara memadai. Sebagian mahasiswa masih memahami politik secara terbatas, terutama berkaitan dengan pemilu, calon pemimpin, atau pergantian kekuasaan. Mereka belum sepenuhnya mampu menghubungkan persoalan politik dengan kebijakan pemerintah maupun kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman, lingkungan, dan tingkat perhatian terhadap persoalan politik yang berbeda.

Penguatan pendidikan politik dan literasi politik diperlukan agar mahasiswa mampu memahami politik secara lebih luas dan tidak hanya melihat politik dari sisi pemilu (Prayogo & Wardhani, 2022).

Kondisi mahasiswa yang belum memahami politik juga dapat dijelaskan melalui pemikiran Al-Ghazali bahwa ilmu menjadi dasar bagi seseorang dalam menentukan amal. Tindakan yang baik membutuhkan pengetahuan yang memadai agar seseorang mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Oleh karena itu, mahasiswa yang masih memiliki keterbatasan pemahaman politik perlu mendapatkan penguatan melalui pembelajaran, organisasi, kajian, diskusi, dan literasi media. Dalam pemikiran Al-Ghazali, ilmu memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang baik melalui amal yang tepat (Rozi, 2021; Fadlilah & Safitri, 2022).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pemahaman politik mahasiswa dapat dilihat dalam tiga kondisi. Pertama, mahasiswa yang telah mengetahui politik tetapi belum mengamalkannya. Kedua, mahasiswa yang mengetahui sekaligus mengamalkan pemahaman politik melalui penggunaan hak pilih, mengikuti perkembangan politik, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mahasiswa yang belum memiliki pemahaman politik secara memadai. Ketiga kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman politik tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan mengubah pengetahuan menjadi sikap dan tindakan (Anggalina et al., 2024).

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori Imam Al-Ghazali, mahasiswa yang tahu tetapi belum mengamalkan menunjukkan adanya ilmu yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam amal, mahasiswa yang tahu dan mengamalkan menunjukkan adanya hubungan antara ilmu dan amal, sedangkan mahasiswa yang belum tahu menunjukkan bahwa aspek ilmu masih perlu diperkuat. Pengamalan politik tersebut juga harus diarahkan pada perilaku yang baik, yaitu kritis tetapi tidak anarkis, berani menyampaikan pendapat tetapi tetap menghargai orang lain, serta aktif berpartisipasi tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian, pemahaman politik mahasiswa tidak berhenti pada persoalan “tahu politik”, tetapi sampai pada kemampuan mengamalkan pengetahuan politik secara bertanggung jawab dan konstruktif (Sauqi, 2026; Anggalina et al., 2024).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, ditemukan bahwa pemahaman politik mahasiswa memiliki tingkat yang beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam memahami persoalan politik

serta sejauh mana pemahaman tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi politik diperoleh mahasiswa melalui dosen, organisasi, pertemanan, kajian, dan media sosial. Keberagaman sumber tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemahaman politik mahasiswa berlangsung melalui lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial. Dalam proses pendidikan, pengetahuan yang diperoleh tidak hanya diharapkan menambah wawasan, tetapi juga mampu membentuk sikap dan perilaku mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat (Daulay, 2021).

Sebagian mahasiswa telah memiliki pemahaman mengenai politik, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara aspek pengetahuan dengan tindakan. Mahasiswa dapat mengetahui konsep dan persoalan politik, tetapi belum menjadikan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman politik tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi politik, karena penerapan pengetahuan juga dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, proses pendidikan tidak cukup berhenti pada pemberian pengetahuan, tetapi perlu diarahkan pada penghayatan dan pengamalan nilai dalam kehidupan (Nata, 2021).

Temuan tersebut dapat dipahami melalui konsep transformasi nilai-nilai Islam. Transformasi nilai tidak hanya berkaitan dengan proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Nilai yang telah diketahui perlu melalui proses internalisasi sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa yang telah memahami politik tetapi belum melaksanakannya menunjukkan bahwa proses transformasi nilai belum sepenuhnya sampai pada tahap pengamalan. Pengetahuan yang diperoleh masih berada pada tataran pemahaman dan belum seluruhnya diwujudkan dalam tindakan nyata (Daulay, 2021).

Hal tersebut juga berkaitan dengan proses transinternalisasi nilai di lingkungan perguruan tinggi. Proses tersebut menempatkan nilai bukan hanya sebagai materi yang diketahui, tetapi sebagai sesuatu yang dihayati dan diwujudkan dalam perilaku. Pembelajaran, diskusi, organisasi mahasiswa, dan pengalaman sosial dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan menjadi sikap dan tindakan. Dengan demikian, masih adanya mahasiswa yang memahami politik tetapi belum menerapkannya menunjukkan bahwa proses pembentukan kesadaran politik masih memerlukan pengalaman dan pembiasaan agar pengetahuan dapat berkembang menjadi perilaku (Hanum et al., 2021).

Jika dilihat dari perspektif Imam Al-Ghazali, keadaan tersebut memiliki hubungan dengan konsep ilmu dan amal. Al-Ghazali memandang bahwa ilmu tidak semestinya berhenti pada pengetahuan, tetapi perlu diwujudkan dalam amal.

Dalam Ihya' 'Ulum al-Din, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu mu'amalah merupakan ilmu yang tidak hanya dituntut untuk diketahui, tetapi juga untuk diamalkan. Dengan demikian, ilmu dan amal memiliki hubungan yang erat, karena pengetahuan seharusnya memberikan pengaruh terhadap perbuatan seseorang.

Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ash-Shaff ayat 2–3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَ تَفْعَلُونَ ٢ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّ أَن تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ ٣ ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. Ash-Shaff: 2–3).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kesesuaian antara apa yang diketahui atau dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang telah memiliki pemahaman mengenai politik tetapi belum menerapkannya dalam kehidupan dapat dipahami sebagai kondisi ketika aspek ilmu telah dimiliki, sedangkan amal sebagai bentuk pengamalan ilmu tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, perspektif Al-Ghazali mengenai keterkaitan ilmu dan amal dapat digunakan untuk menjelaskan adanya kesenjangan antara pemahaman politik mahasiswa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, terdapat mahasiswa yang telah mampu menghubungkan pemahaman politik dengan tindakan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan hak pilih dalam pemilu dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh, mengikuti berita politik dan perkembangan kebijakan pemerintah, berdiskusi mengenai persoalan politik, serta menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang dianggap penting. Mahasiswa juga menunjukkan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mengikuti kegiatan masyarakat seperti musyawarah atau rapat lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengetahuan politik tidak hanya disimpan sebagai informasi, tetapi telah digunakan sebagai dasar dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan (Zada et al., 2022).

Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan politik mahasiswa tidak harus selalu berbentuk keterlibatan dalam politik praktis. Menggunakan hak pilih, mengikuti perkembangan kebijakan, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mengikuti musyawarah juga merupakan bentuk keterlibatan sebagai warga negara. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki posisi penting karena kemampuan intelektualnya dapat digunakan untuk memberikan

perhatian dan kritik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemahaman politik yang baik dengan demikian dapat mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang aktif sekaligus bertanggung jawab (Zada et al., 2022).

Pemahaman politik yang diterapkan dalam kehidupan juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas sosial dan politik. Politik tidak hanya dipahami sebagai persoalan kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan bersama yang membutuhkan tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks tersebut, nilai Islam dapat memberikan arah agar keterlibatan politik mahasiswa tidak hanya aktif, tetapi juga memiliki dasar moral (Shihab, 2022).

Cara mahasiswa dalam menerima informasi politik juga menjadi bagian penting dari pemahaman politik. Mahasiswa yang tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya menunjukkan adanya sikap kritis terhadap informasi. Sikap tersebut diperlukan karena perkembangan media sosial memberikan kemudahan dalam memperoleh sekaligus menyebarkan informasi politik. Dalam pemikiran Al-Mawardi, pemahaman mengenai kehidupan politik tidak terlepas dari pentingnya pengetahuan, pertimbangan yang matang, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, kemampuan memeriksa informasi, mempertimbangkan sumber, memahami konteks, dan menggunakan pengetahuan secara bijaksana sebelum menentukan sikap dapat membantu mahasiswa membangun pandangan politik secara lebih rasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih dan Zulkarnaen yang menunjukkan bahwa akses terhadap berbagai sumber informasi turut memengaruhi perkembangan kesadaran dan pemikiran politik mahasiswa (Saragih & Zulkarnaen, 2025).

Keterlibatan politik mahasiswa juga perlu diarahkan pada cara berpolitik yang sesuai dengan nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik, memberikan aspirasi, melakukan kajian, berdiskusi, maupun menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan tersebut perlu dilakukan dengan cara yang damai dan bertanggung jawab. Sikap kritis tidak harus diwujudkan melalui kekerasan, perusakan fasilitas umum, provokasi, ataupun tindakan anarkis. Kritik akan lebih bermakna apabila disampaikan berdasarkan argumentasi, data, dan kepentingan masyarakat serta tetap menghargai perbedaan pendapat (Azra, 2021).

Dengan demikian, mahasiswa idealnya mampu membedakan antara berpolitik secara kritis dan berpolitik secara anarkis. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, mahasiswa dapat menyampaikan kritik melalui diskusi akademik, kajian, tulisan, organisasi mahasiswa, musyawarah, forum publik, maupun demonstrasi secara damai. Cara tersebut menunjukkan keberanian mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap ketertiban dan hak masyarakat lainnya. Dalam perspektif nilai Islam, keberanian menyampaikan kebenaran perlu berjalan bersama dengan sikap bertanggung jawab dan menghormati kepentingan orang lain (Shihab, 2022).

Kondisi yang berbeda ditemukan pada mahasiswa yang belum memiliki pemahaman politik secara memadai. Sebagian mahasiswa masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai politik dan belum mampu menghubungkan persoalan politik dengan kehidupan masyarakat. Politik cenderung dipahami sebatas pemilu, calon pemimpin, atau pergantian kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman politik mahasiswa tidak seragam meskipun mereka berada dalam lingkungan perguruan tinggi yang sama. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman, minat, lingkungan, serta intensitas mahasiswa dalam memperoleh dan mengolah informasi politik (Budia et al., 2022).

Keberadaan mahasiswa yang belum memahami politik menunjukkan bahwa proses pendidikan politik masih membutuhkan penguatan. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran sosial dan politik. Pembelajaran, kajian, diskusi, organisasi kemahasiswaan, serta kegiatan sosial dapat digunakan untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara persoalan politik dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengetahui politik secara teoritis, tetapi juga mampu memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Hanum et al., 2021).

Apabila ketiga kondisi tersebut dikaitkan dengan teori Imam Al-Ghazali, terlihat adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pengamalan. Mahasiswa yang belum memahami politik menunjukkan bahwa aspek ilmu masih perlu diperkuat. Mahasiswa yang telah memahami politik tetapi belum melaksanakannya menunjukkan bahwa ilmu telah dimiliki, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam amal. Sementara itu, mahasiswa yang telah memahami dan melaksanakan politik menunjukkan adanya hubungan yang lebih kuat antara ilmu dan amal karena pengetahuan yang diperoleh telah memengaruhi sikap dan tindakan. Dengan demikian, konsep ilmu dan amal Al-Ghazali dapat digunakan untuk menjelaskan

perbedaan pemahaman dan penerapan politik mahasiswa dalam penelitian ini (Fadlilah & Safitri, 2022).

Pada akhirnya, transformasi nilai-nilai Islam dalam pemahaman politik mahasiswa tidak hanya dapat dilihat dari bertambahnya pengetahuan mengenai politik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku. Nilai keadilan, musyawarah, amanah, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial dapat menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami serta menjalankan kehidupan politik. Proses tersebut berlangsung melalui berbagai lingkungan, baik pembelajaran di perguruan tinggi, organisasi, pertemanan, kajian, maupun media sosial. Oleh karena itu, transformasi nilai membutuhkan proses yang berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dapat berkembang menjadi kesadaran dan kemudian diwujudkan dalam tindakan (Daulay, 2021; Hanum et al., 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman politik mahasiswa memiliki tiga keadaan, yaitu mengetahui tetapi belum mengamalkan, mengetahui dan mengamalkan, serta belum mengetahui atau memahami secara memadai. Ketiga kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses transformasi nilai tidak berlangsung secara sama pada setiap mahasiswa. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, keadaan tersebut dapat dipahami melalui hubungan ilmu dan amal. Pengetahuan politik idealnya tidak berhenti pada apa yang diketahui, tetapi diwujudkan melalui partisipasi yang bertanggung jawab, sikap kritis terhadap informasi, kemampuan bermusyawarah, keberanian menyampaikan pendapat, serta keterlibatan sosial yang tidak mengarah pada kekerasan dan tindakan anarkis. Dengan demikian, pemahaman politik mahasiswa yang ideal adalah pemahaman yang mampu menghubungkan ilmu, nilai, dan amal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nata, 2021; Fadlilah & Safitri, 2022).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi nilainilai Islam pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berlangsung melalui berbagai proses, yaitu perkuliahan, kajian keislaman, organisasi kemahasiswaan, interaksi dengan dosen, serta lingkungan pertemanan. Proses tersebut berkontribusi dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam, seperti keadilan, amanah, musyawarah, ukhuwah, toleransi, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai Islam memberikan implikasi terhadap pemahaman politik mahasiswa.

Sebagian besar mahasiswa memandang politik sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sebagian informan masih memaknai politik sebagai proses memperoleh kekuasaan, mereka berpendapat bahwa kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.Dengan demikian, transformasi nilai-nilai Islam di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berperan dalam membentuk pemahaman politik mahasiswa yang lebih moderat, berorientasi pada kemaslahatan, serta selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan ajaran Islam. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan terus memperkuat proses internalisasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan akademik maupun kemahasiswaan guna membentuk generasi yang memiliki integritas moral, wawasan politik yang konstruktif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Jalil, M. (2021). *Konsep pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam*. *Jurnal Al-Fikrah*. https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.49

Anwar, K., Surawan, & Saefulloh. (2023). *Internalization of Islamic moderation values to counter radicalism and terrorism*. *International Journal of Arts and Social Science*.

Azra, A. (2021). *Moderasi Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Budia, I., dkk. (2022). *Pengembangan Islamic Milenial Podcast sebagai sarana pendidikan politik di kalangan mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4300

Daulay, H. P. (2021). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. (2022). *Penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam*. Kementerian Agama RI.

Fadlilah, A., & Safitri, I. (2022). Implementasi konsep ilmu dalam kitab *Ihya' 'Ulumiddin* di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat Paciran Lamongan. *Rabbayani: Jurnal Pendidikan dan Peradaban Islami*. https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/rabbayani/article/view/2266

Fahrudin, F., dkk. (2021). *Ali Jum'ah Sufistic Thinking and Its Relevance on Islamic Education in Higher Education*. *Lentera Pendidikan*. https://doi.org/10.24252/lp.2021v24n2i7

Hanum, L., Siddik, D., & Daulay, H. P. (2021). *Transinternalisasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran di Universitas Islam Sumatera Utara*. *Analytica Islamica*.

Huda, S. (2021). *Transformasi nilai mahasiswa dalam pendidikan Islam*. *Journal of Islamic Education Management*. https://doi.org/10.30762/joiem.v2i2.3127

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Indeks moderasi beragama Indonesia*. Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Moderasi beragama* (Edisi revisi). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Panduan implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi*. Kementerian Agama RI.

Lavan, Y. O. (2021). *Implementation of Islamic values in Indonesian political dynamics*. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042

Masruroh, S., dkk. (2021). *Implementasi nilai iman, Islam dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum*. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.35706/muntazam.v2i01.5343

Muhja, Z. A., dkk. (2022). *Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran mata kuliah agama Islam*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1238

Nata, A. (2021). *Pemikiran pendidikan Islam kontemporer*. Kencana.

Quraish Shihab, M. (2022). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.

Riduan, A., & Lutfi, S. (2023). *Transformasi nilai-nilai keislaman mahasiswa: Meneropong eksistensi Ma'had Al-Jami'ah dalam pendidikan ibadah*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.21035

Saleh, F. A., & Arif, M. (2021). *Nilai-nilai Islam wasathiyah pada tema Islam Nusantara dalam buku teks SKI tingkat MTs*. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.2.339-363

Saragih, Y. N., & Zulkarnaen. (2025). *Transformasi pemikiran politik Islam: Studi kasus mahasiswa Pemikiran Politik Islam angkatan 2021 Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara*. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*. https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.4932

Zada, K., dkk. (2022). *Constitutionalizing Sharia: Identity and independence of Islamic politics among students*. *Juris*. https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6954